

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PROSEDUR PEMBIAYAAN DI BPRS LANTABUR TEBUIRENG

Ahmad Syahni¹, STIES Babussalam Jombang, ahmadsyahni46@gmail.com
Nur Laily Hidayati², STIES Babussalam Jombang, nurlailyhidayati@gmail.com
Dimiyati³, UIN Sunan Ampel Surabaya, adhim.ptrg@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 01 Juli 2025

Accepted : 15 Juli 2025

Published : 30 Agustus 2025

Page : 18 - 26

Keyword : Efektivitas,
Pengendalian Internal, Prosedur
Pembiayaan, BPRS Lantabur
Tebuireng

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian internal pada prosedur pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya penerapan sistem pengendalian internal yang baik untuk mengelola risiko besar yang terkandung dalam penyaluran pembiayaan, terutama yang bersumber dari dana pihak ketiga yang dikelola BPRS. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan terkait Pengendalian Internal dan kebijakan prosedur pemberian pembiayaan di BPRS Lantabur, serta wawancara dengan Satuan Pengendalian Internal, account officer, pimpinan cabang, dan legal officer. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan untuk melihat sejauh mana efektivitas kontribusi pengendalian internal dalam mengawasi prosedur pembiayaan yang benar dan menghindari penyimpangan, dengan harapan meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal pada prosedur pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng secara umum telah berjalan efektif. Efektivitas ini terlihat dari penerapan kelima unsur pengendalian internal (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan) di setiap tahapan prosedur pembiayaan. Efektivitas pengendalian paling menonjol pada tahap pra-pencairan pembiayaan, yang ditandai dengan adanya pemisahan fungsi yang jelas, mekanisme otorisasi berjenjang melalui Komite Pembiayaan, dan kelengkapan dokumentasi, yang secara signifikan meminimalisir risiko salah analisis dan potensi fraud. Meskipun efektif, terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya pada aspek pengawasan (monitoring) pembiayaan setelah dana dicairkan dan aspek komunikasi hasil pemantauan. Pelaporan pemantauan masih kurang terstruktur dan cenderung reaktif, yang dapat memperlambat tindakan pencegahan dini terhadap pembiayaan yang berpotensi bermasalah. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkuat fungsi pemantauan dengan membuat format laporan kunjungan nasabah yang lebih terstruktur dan terjadwal, serta meningkatkan sistem informasi dan komunikasi, misalnya dengan memanfaatkan teknologi untuk pelaporan lapangan secara real-time.

Editorial Office :

Istifada : Jurnal Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. LATAR BELAKANG

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional yang mengalami perubahan begitu cepat dan tantangan yang berat diperlukan perbankan nasional yang dapat melayani masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah secara optimal dan diperlukan pemberdayaan perbankan Indonesia yang fokus pada pengembangan sektor riil usaha mikro. Identitas ini ada pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Berdirinya BPRS dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang tengah mengalami restrukturisasi ekonomi yang terwujud dalam berbagai kebijakan baik di bidang keuangan, moneter termasuk dalam bidang perbankan. Selain itu, berdirinya BPRS dilatarbelakangi pula oleh adanya peluang bagi pengembangan bank Islam dalam Undang-undang (UU) Perbankan yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil.¹

Saat ini di Indonesia telah banyak berdiri bank-bank berdasarkan prinsip syariah, termasuk BPRS. Terlebih lagi ketika peluang beroperasinya BPR Syariah semakin terbuka setelah Peraturan Bank Indonesia mengesahkan tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah yang diharapkan mampu memecahkan permasalahan para pengusaha kecil dalam penyediaan modal.²

BPRS Lantabur Tebuireng merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berada di Jl. A. Yani Ruko Citra Niaga Pasar Legi, Jombang. BPRS Lantabur melayani jasa keuangan berupa simpanan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sumber dana yang dikelola BPRS Lantabur berasal dari dana sendiri dari para pemegang saham serta dana pihak ketiga. Salah satu fasilitas dari BPRS Lantabur adalah Pembiayaan. Risiko yang dikandung dalam penyaluran pembiayaan cukup besar. Dana pihak ketiga yang dikelola BPRS Lantabur jika tidak diimbangi oleh penerapan sistem pengendalian internal yang baik dalam melakukan aktivitas penyaluran dana tersebut dalam bentuk pembiayaan maka akan memunculkan risiko dalam penyaluran pembiayaan tersebut. Agar proses pembiayaan dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya sistem pengendalian internal yang

terkelola dengan baik. Hal ini dikarenakan untuk melindungi sumber daya BPRS Lantabur dari kemungkinan kerugian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data dengan cara observasi lapangan di BPRS Lantabur tentang Pengendalian Internal dan kebijakan terkait prosedur pemberian pembiayaan. Data yang telah diperoleh kemudian dideskripsikan pada tulisan ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pengendalian internal di BPRS Lantabur pada prosedur pemberian pembiayaan.

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah terkait peran pengendalian internal dalam menemukan kesalahan-kesalahan dalam prosedur pemberian pembiayaan dan juga kontribusinya dalam memberi masukan guna perbaikan terhadap prosedur pembiayaan yang telah ada. Observasi di lapangan selain melihat dokumen prosedur pembiayaan juga dikembangkan dalam bentuk wawancara kepada Satuan Pengendalian Internal dan pihak-pihak yang berkaitan dalam pemberian pembiayaan yang meliputi marketing pembiayaan (*account officer*), pimpinan cabang dan legal *officer*.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengungkap suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan.³ Sumber data yang didapat selain dari observasi lapangan juga menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis melihat sejauh mana efektivitas kontribusi pengendalian internal di BPRS Lantabur dalam mengawasi prosedur pembiayaan yang benar dan menghindari penyimpangan, sehingga harapannya dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

C. Tinjauan Umum tentang Pengendalian Internal dan Pembiayaan

1. Pengendalian Internal dalam Perspektif Islam

Manusia dibekali oleh Allah akal dan hati untuk berpikir dan merasakan, sehingga ada potensi di

¹ H.A.Djazuli, Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (LPU), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, Cet ke-1, 108.

² PBI No. 6/17/PBI/2004

³ Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2009), 25.

dalam dirinya untuk berbuat kebaikan atau sebaliknya menyimpang dari kebenaran. Oleh sebab itu dibutuhkan pengendalian untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan apa yang hak.⁴

Pembagaan pengendalian dalam ajaran dalam Islam paling tidak terbagi menjadi dua hal: Pertama, pengendalian yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt. Kedua, pengendalian yang berasal dari luar seperti yang dilakukan sistem pada sebuah lembaga melalui pengawasan dari manajemen yang ada.⁵ Pengendalian dalam Islam memiliki beberapa landasan sebagaimana firman Allah swt.:

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.⁶

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pengendalian merupakan hal yang paling diperhatikan agar suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim baik untuk kepentingan pribadi ataupun kerja dengan atas nama lembaga atau institusi dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi, pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.⁷ Sedangkan menurut Nugroho Widjajanto berpendapat bahwa pengendalian internal adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi

struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk: (1) Mengamankan aktiva perusahaan, (2) Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, (3) Meningkatkan efisiensi, dan (4) Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.⁸

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berguna untuk menjaga integritas informasi akuntansi, melindungi aktiva perusahaan terhadap kecurangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang ada di dalam atau di luar perusahaan.

b. Tujuan, Jenis dan Fungsi

Penerapan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dari sistem tersebut, diantaranya:⁹

- 1) Menjaga kekayaan dan catatan perusahaan.
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
- 3) Mendorong efisiensi dan operasional perusahaan.
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan jenisnya, sistem pengendalian internal dapat digolongkan kepada dua macam:¹⁰

- 1) Pengendalian internal akuntansi, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
- 2) Pengendalian internal administratif, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian Internal melaksanakan tiga fungsi penting dalam sebuah organisasi, yaitu:¹¹

⁴ Abdul Manan, *Membangun Islam Kaffah*, Madina Pustaka : 2000. 152.
⁵ Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dan Praktik*. Gema Insani Jakarta : 2003. 156.
⁶ Ter Q.S. Al-'Ashr: 1-3
⁷ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta : Salemba Empat, 2001, Cet. Ketiga, 164.

⁸ Nugroho Widjajanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta : Erlangga, 2001, 18.
⁹ Abdul Halim, *Auditing*, Edisi ke-2, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2001, Jilid 1, 191.
¹⁰ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, 164.
¹¹ George Bodnar dan William S Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta : Andi, 2006. 154.

1) Pengendalian untuk pencegahan

Berguna untuk mencegah timbulnya suatu masalah sebelum ada masalah, seperti: memperkerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi.

2) Pengendalian untuk pemeriksaan

Untuk mengungkap masalah saat masalah tersebut ada, contoh: pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan.

3) Pengendalian korektif

Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian pemeriksaan, sehingga harapannya ada perbaikan dan kesalahan yang terjadi tidak terulang.

c. Unsur Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal mencakup lima unsur, yaitu: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; aktivitas kontrol; informasi dan komunikasi; pengawasan.¹² Faktor-faktor yang tercakup dalam lingkungan pengendalian meliputi integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; filosofi manajemen dan karakter bisnis; struktur organisasi yang jelas dan tidak saling tumpang tindih; dewan komisaris dan komite audit yang independent; metode pembagian otoritas dan tanggung jawab yang terarah; kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang kompeten sesuai bidangnya.

Penilaian risiko adalah identifikasi, analisis dan manajemen risiko entitas (secara keseluruhan) yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses penilaian risiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan ketentuan manajemen dalam laporan keuangan.¹³

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur pengendalian yang harus dibuat

dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa tindakan manajemen untuk mengatasi resiko pencapaian tujuan organisasi secara efektif telah dijalankan.¹⁴

Menurut J.W. Wilkinson informasi terdiri dari data yang telah ditransformasi dan dibuat lebih bernilai melalui proses. Idealnya, informasi adalah pengetahuan yang berarti dan berguna untuk mencapai sasaran. Sementara itu data adalah fakta, angka, bahkan simbol mentah.¹⁵

Komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan-pesan dari pengiriman pesan (komunikator) kepada penerima (komunikan). Dengan catatan pula bahwa proses tersebut bertujuan mencapai saling pengertian.¹⁶ Selanjutnya komunikasi melibatkan penyediaan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pelaporan keuangan kepada pihak-pihak terkait dari suatu organisasi secara tepat waktu.

Komunikasi juga mencakup tujuan yang lebih luas dalam memberikan pemahaman yang jelas tentang peranan individu dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Komunikasi mencakup perluasan pemahaman personil tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan yang berhubungan dengan pekerjaan lainnya.¹⁷

Pengawasan adalah proses penilaian kualitas kerja pengendalian internal dari waktu ke waktu terhadap aktifitas rutin yang normal terjadi. Pemantauan kinerja merupakan hal penting dalam pengawasan. Ada beberapa metode pokok dalam melakukan pemantauan kinerja, yaitu :¹⁸

1) Supervisi yang Efektif

Supervisi yang efektif mencakup :

- a) Pelatihan dan asistensi karyawan.
- b) Pemantauan kinerja karyawan.
- c) Koreksi kesalahan.
- d) Penjagaan aktiva dengan cara memantau karyawan yang memiliki akses ke aktiva tersebut.

¹² Ibid, 233.

¹³ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta : AMP YKPN, 2002, h. 233.

¹⁴ Marshal Romney dan Paul John Steinbart, *Accounting Information Systems*, Jakarta: Salemba Empat, 2004, 231.

¹⁵ Joseph W. Wilkinson, *Sistem Akuntansi dan Informasi*, Jakarta : Binarupa Aksara, 1993, Ed ke-3, Jilid ke-1, 3.

¹⁶ Redi Panuju, *Komunikasi Bisnis : Bisnis sebagai Proses Komunikasi, Komunikasi sebagai Kegiatan Bisnis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995, Cet. Ke-2, 4.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, 237.

2) Pelaporan Pertanggungjawaban

Pelaporan pertanggungjawaban mencakup:

- a) Anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, kualitas standar
- b) Laporan kinerja, yang berisi informasi realisasi rencana, rencana (anggaran), dan selisih keduanya.
- c) Prosedur untuk menyelidiki selisih yang jumlahnya signifikan dan prosedur untuk menindaklanjuti penyimpangan dari rencana.

3) Internal Auditing

Internal auditing merupakan aktivitas pengkajian terhadap daya andal, integritas informasi operasi dan keuangan, serta memberikan suatu penilaian terhadap efektivitas pengawasan intern. Aktivitas yang dilakukan mencakup :

- a) Penilaian ketaatan karyawan terhadap kebijakan manajemen, prosedur dan peraturan yang berlaku.
- b) Penilaian efektivitas dan efisiensi manajemen.

3. Kajian Teoretis tentang Pembiayaan

a. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yaitu penyaluran dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung aneka kebutuhan yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁹ Pembiayaan merupakan aktivitas dari bank syariah yang menjadi sumber pendapatan, sehingga tujuan dari pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yaitu pemilik atau pemegang saham; pegawai bank; masyarakat di sekitar bank baik yang sudah menjadi nasabah atau belum; dan pemerintah karena sudah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.²⁰

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, menurut Sinungan pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk: (1) Meningkatkan daya guna uang dan barang; (2) Meningkatkan semangat dalam berusaha; (3) Membantu stabilitas ekonomi; (4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.²¹

b. Jenis Pembiayaan pada Bank Syariah

1) Prinsip Jual Beli (*al-Bay'*)

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

a) Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.²²

b) Salam

Jual beli dengan akad salam berarti akad pembelian sebuah barang yang penghantaranya ditangguhkan dengan pembayaran segera menurut syarat-syarat tertentu.²³

c) Istishna

Istishna merupakan suatu jenis jual beli khusus dari salam, akad istishna ini biasanya digunakan dalam bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan istishna mengikuti ketentuan dan aturan dalam akad salam. Namun pada istishna pembayaran dilakukan beberapa kali pembayaran atau dapat dicicil.²⁴

2) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

a) Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵

b) Mudharabah

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : UPPAMP YKPN, 2005, 17.

²⁰ Ibid., 18-19.

²¹ Ibid., 19-21.

²² Tim Pengembang Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syaiah*, Jakarta: Djembatan, 2001, 76.

²³ Ibid.

²⁴ Syafi'I Antonio, *Bank syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute, 2001, 76.

²⁵ Ibid., 143.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. Jika kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian itu.²⁶

3) Prinsip Sewa/ Multijasa (*Ijarah*)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁷ Namun jika diikuti dengan pemindahan kepemilikan barangnya di akhir akad, maka itu disebut *Ijarah Muntahiya bi al-tamlik*.

4) Akad Pelengkap

a) *Hiwalah*

Akad pengalihan kewajiban membayar utang dari pihak yang berutang (*muhil*) kepada pihak lain yang wajib menanggungnya (*muhal 'alaih*), atau pengalihan hak menagih piutang. Fungsi akad ini yaitu memfasilitasi penyelesaian utang-piutang yang melibatkan tiga pihak atau lebih. Di perbankan modern, ini menjadi dasar produk anjak piutang syariah (*Sharia Factoring*).

b) *Wakalah (Perwakilan / Pemberian Kuasa)*

Akad di mana satu pihak (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Jika ada imbalan/fee, disebut Wakalah bil Ujrah. Akad ini berfungsi sebagai efisiensi operasional. Bank tidak perlu melakukan semua hal teknis secara langsung. Kebanyakan pada akad murabahah menggunakan wakalah sehingga disebut murabahah bil wakalah.

c) *Kafalah (Penjaminan)*

Akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak (*kafil* atau penjamin) kepada pihak lain, di mana penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin (*makful 'anhu*). Akad ini berfungsi sebagai mitigasi risiko pembiayaan atau gagal bayar.

d) *Rahn (Gadai / Agunan)*

Menjadikan suatu aset bernilai sebagai jaminan atau agunan atas suatu hutang (dain). Aset ini dapat dijual untuk melunasi utang jika nasabah wanprestasi (gagal bayar). Akad ini berfungsi sebagai mitigasi risiko pembiayaan dengan menyediakan jaminan fisik yang bisa dieksekusi.

e) *Qardh (Pinjaman Kebajikan)*

Pinjaman tanpa adanya imbalan atau bunga (riba). Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman. Bank boleh mengenakan biaya administrasi riil, tetapi bukan persentase dari pinjaman. Akad ini berfungsi sebagai akad sosial (*tabarru'*) untuk menutupi kekurangan dana jangka pendek atau sebagai fitur dalam produk lain.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang dilakukan di BPRS Lantabur Tebuireng, penelitian ini menemukan beberapa hal terkait efektivitas pengendalian internal pada prosedur pembiayaan. Pembahasan akan diuraikan dengan membandingkan praktik di lapangan dengan kerangka teoretis yang telah dipaparkan pada tinjauan pustaka.

1. Prosedur Pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng

Secara umum, prosedur pemberian pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng telah terdokumentasi dengan baik dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) internal. Prosedur ini dapat dirinci ke dalam beberapa tahapan utama, di mana pada setiap tahapannya terdapat aktivitas pengendalian yang melekat. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Tahap Pengajuan Pembiayaan:** Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir dan melengkapi dokumen persyaratan yang ditetapkan, seperti identitas diri, surat keterangan usaha, dan dokumen jaminan. *Account Officer* (AO) atau bagian marketing bertugas menerima dan melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen.
- b. **Tahap Analisis dan Penilaian Kelayakan:** Setelah dokumen

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid, 181.

dinyatakan lengkap, AO melakukan analisis kelayakan pembiayaan yang dikenal dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*). Proses ini mencakup wawancara mendalam dengan calon nasabah, survei langsung ke lokasi usaha dan tempat tinggal (*on-the-spot*), serta pengecekan riwayat pembiayaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

- c. **Tahap Persetujuan Pembiayaan:** Hasil analisis AO dituangkan dalam Memorandum Analisis Pembiayaan (MAP) yang kemudian diajukan kepada Komite Pembiayaan. Komite ini terdiri dari Pimpinan Cabang, *Account Officer*, dan *Legal Officer*. Keputusan untuk menyetujui, menolak, atau menyetujui dengan syarat tertentu diambil secara kolektif dalam rapat komite.
- d. **Tahap Akad dan Pencairan:** Jika pembiayaan disetujui, bagian legal akan menyiapkan draf akad pembiayaan (misalnya *Murabahah* atau *Musyarakah*) dan melakukan pengikatan jaminan. Penandatanganan akad dilakukan di hadapan pejabat bank, setelah itu bagian operasional (teller) akan melakukan pencairan dana ke rekening nasabah.
- e. **Tahap Pemantauan (Monitoring):** Setelah dana dicairkan, AO memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan usaha nasabah dan kelancaran pembayaran angsuran.

2. Implementasi dan Efektivitas Pengendalian Internal

Penerapan unsur-unsur pengendalian internal pada prosedur pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. **Lingkungan Pengendalian:** BPRS Lantabur telah membangun lingkungan pengendalian yang cukup kondusif. Hal ini terlihat dari adanya struktur

organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan wewenang yang tegas antara bagian marketing (AO), analisis, komite pembiayaan, legal, dan operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan cabang, ditekankan bahwa integritas dan nilai-nilai etika Islam menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas operasional, sejalan dengan prinsip pengendalian dari dalam diri (iman) yang telah dibahas sebelumnya.

- b. **Penilaian Risiko:** Aktivitas penilaian risiko secara inheren telah terintegrasi dalam tahap analisis kelayakan pembiayaan. Penggunaan prinsip 5C dan pengecekan SLIK OJK merupakan bentuk identifikasi dan analisis risiko kredit yang akan dihadapi. Pihak manajemen, khususnya Komite Pembiayaan, secara aktif mengidentifikasi potensi risiko seperti risiko karakter nasabah, risiko pasar dari usaha yang dibiayai, dan risiko yuridis terkait jaminan.
- c. **Aktivitas Pengendalian:** Ini adalah unsur yang paling terlihat dalam prosedur pembiayaan. Beberapa aktivitas pengendalian utama yang efektif diterapkan antara lain:
 - 1) **Pemisahan Fungsi (Segregation of Duties):** Terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi AO yang mencari nasabah, Komite yang memutuskan, bagian legal yang mengikat jaminan, dan bagian operasional yang mencairkan dana. Hal ini mencegah satu orang memiliki kendali penuh atas seluruh proses, sehingga meminimalisir potensi kecurangan. Ini merupakan bentuk nyata dari *pengendalian untuk pencegahan*.
 - 2) **Otorisasi yang Memadai:** Setiap pembiayaan harus melalui otorisasi dari Komite Pembiayaan. Keputusan tidak berada di tangan satu individu, melainkan keputusan kolektif yang didasarkan pada data analisis yang objektif. Plafon kewenangan untuk menyetujui

pembiayaan juga diatur berdasarkan jabatan.^[^28]

- 3) **Dokumentasi dan Pencatatan yang Baik:** Setiap tahapan, mulai dari pengajuan hingga pencairan, didokumentasikan dengan lengkap, mulai dari formulir aplikasi, hasil survei, MAP, hingga salinan akad. Dokumentasi ini berfungsi sebagai *jejak audit (audit trail)* yang memungkinkan dilakukannya penelusuran jika terjadi masalah di kemudian hari.
- 4) **Verifikasi Independen:** Analisis yang dilakukan oleh AO akan ditelaah kembali oleh anggota Komite Pembiayaan. Selain itu, sebelum pencairan, bagian operasional akan memastikan bahwa seluruh dokumen persetujuan dan akad telah lengkap dan ditandatangani. Ini merupakan wujud *pengendalian untuk pemeriksaan*.
- d. **Informasi dan Komunikasi:** Alur informasi dari AO ke Komite Pembiayaan berjalan cukup efektif melalui dokumen MAP. Kebijakan dan prosedur pembiayaan juga telah dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh staf terkait melalui SOP tertulis dan arahan rutin dalam rapat pagi (*morning briefing*). Namun, ditemukan sedikit kelemahan dalam komunikasi hasil pemantauan AO kepada manajemen secara sistematis, di mana pelaporan cenderung lebih intensif ketika nasabah mulai menunjukkan gejala tunggakan.
- e. **Pengawasan (Monitoring):** Pengawasan dilakukan melalui dua jalur. Pertama, supervisi langsung oleh Pimpinan Cabang terhadap kinerja para AO. Kedua, melalui peran Satuan Pengendalian Internal (SPI) yang secara periodik melakukan audit terhadap sampel berkas pembiayaan untuk memastikan kesesuaian dengan SOP. Berdasarkan wawancara dengan pihak SPI, ditemukan beberapa kasus ketidaklengkapan dokumen minor atau keterlambatan AO dalam melaporkan

kunjungan nasabah. Temuan ini kemudian menjadi dasar untuk *pengendalian korektif*, di mana SPI memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen dan teguran kepada staf terkait.

Secara keseluruhan, sistem pengendalian internal pada prosedur pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng telah berjalan efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang signifikan. Mekanisme *check and balance* antar fungsi berjalan baik, dan peran SPI sebagai auditor internal mampu mengidentifikasi dan mengoreksi beberapa kelemahan prosedur. Meskipun demikian, efektivitas pada tahap pemantauan pembiayaan pasca-pencairan masih perlu ditingkatkan agar lebih proaktif dalam mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sistem Pengendalian Internal pada prosedur pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng secara umum telah berjalan **efektif**. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan kelima unsur pengendalian internal (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan) pada setiap tahapan prosedur pembiayaan, mulai dari pengajuan hingga pemantauan.
- b. Efektivitas pengendalian internal paling menonjol pada tahap pra-pencairan pembiayaan, yang ditandai dengan adanya pemisahan fungsi yang jelas, mekanisme otorisasi berjenjang melalui Komite Pembiayaan, dan kelengkapan dokumentasi. Praktik-praktik ini secara signifikan mampu meminimalisir risiko salah analisis dan potensi fraud.
- c. Meskipun efektif, masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya pada aspek **pengawasan (monitoring)** pembiayaan setelah dana dicairkan dan aspek **komunikasi** hasil pemantauan. Pelaporan pemantauan yang masih kurang terstruktur dan cenderung reaktif

dapat sedikit memperlambat tindakan pencegahan dini terhadap pembiayaan yang berpotensi bermasalah.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi BPRS Lantabur Tebuireng dan penelitian selanjutnya:

a. Bagi BPRS Lantabur Tebuireng

- 1) Memperkuat fungsi pemantauan (monitoring) dengan membuat format laporan kunjungan nasabah yang lebih terstruktur dan terjadwal. Laporan ini sebaiknya tidak hanya fokus pada kelancaran angsuran, tetapi juga pada perkembangan usaha nasabah secara kualitatif.
- 2) Meningkatkan sistem informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi sederhana, misalnya membuat grup komunikasi khusus untuk tim pembiayaan di mana AO dapat melaporkan temuan-temuan penting di lapangan secara *real-time* kepada Pimpinan Cabang.
- 3) Secara berkala, mengadakan pelatihan atau *refreshment* bagi para *Account Officer* mengenai teknik identifikasi dini (*early warning system*) terhadap gejala-gejala pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur seberapa besar pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) di BPRS.
- 2) Melakukan penelitian komparatif antara beberapa BPRS untuk membandingkan praktik pengendalian internal dan mengidentifikasi *best practice* dalam industri perbankan syariah skala mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Auditing, Edisi ke-2, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2001, Jilid 1, 191.

Abdul Manan, Membangun Islam Kaffah, Madina Pustaka : 2000. 152.

Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dan Praktik. Gema Insani Jakarta : 2003. 156.

Djam'an Satori dan Aan Komariyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: ALFABETA, 2009), 25.

George Bodnar dan William S Hopwood, Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta : Andi, 2006. 154.

H.A.Djazuli, Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (LPU), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, Cet ke-1, 108.

Joseph W. Wilkinson, Sistem Akuntiting dan Informas, Jakarta : Binarupa Aksara, 1993, Ed ke-3, Jilid ke-1, 3.

Krismiaji, Sistem Informasi Akuntansi, 237.

Krismiaji, Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta : AMP YKPN, 2002, h. 233.

Marshal Romney dan Paul John Steinbart, Accounting Information Systems, Jakarta: Salemba Empat, 2004, 231.

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta : UPPAMP YKPN, 2005, 17.

Mulyadi, Sistem Akuntansi, 164.

Mulyadi, Sistem Akuntansi, Jakarta : Salemba Empat, 2001, Cet. Ketiga, 164.

Nugroho Widjajanto, Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta : Erlangga, 2001, 18.

PBI No. 6/17/PBI/2004

Redi Panuju, Komunikasi Bisnis : Bisnis sebagaiProses Komunikasi, Komunikasi sebagai Kegiatan Bisnis, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995, Cet. Ke-2, 4.

Syafi’I Antonio, Bank syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Tazkia Institute, 2001, 76.

Ter Q.S. Al-’Ashr: 1-3

Tim Pengembang Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syaiah, Jakarta: Djambatan, 2001, 76.